

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENEGAKERJAAN CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1**



Oleh :

**CENDY FAADHILAH
07011381621113**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN
KERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) KETENAGAKERJAAN CABANG PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Negara**


Oleh :

**Cendy Faadhilah
07011381621113**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2021 Pembimbing I

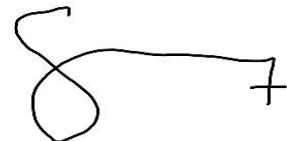
Pembimbing I

**Dr. Nengvanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002**



Pembimbing II

**Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palembang"* telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 13 Januari 2021.

Palembang, 13 Januari 2021

Ketua

1. Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196911191998032001

Anggota

2. Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

3. Sofyan Effendy S.IP., M.SI
NIP. 197705122003121003

4. Dwi Mirani S.IP., MSI
NIP. 198106082008122002

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.

(Ki Hadjar Dewantara)

Pendidikan adalah senjata, yang efeknya tergantung pada siapa yang memegang di tangannya dan pada siapa itu ditujukan.

(Joseph Stalin)

Dengan rahmat dan ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku,
Kusmiati dan Johansyah.
2. Saudaraku, Adib Kurniawan
3. Sahabat dan teman-temanku.
4. Almamaterku.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palembang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja ini masih terdapat klaim yang tertunda pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klaim dari program jaminan kecelakaan kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi Charles Jones, dimana terdapat tiga dimensi implementasi kebijakan, yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses klaim pada program jaminan kecelakaan kerja ini masih memiliki kendala dikarenakan pada dimensi organisasi wewenang pada pemegang kata sandi penginputan data klaim hanya pada satu staff saja dan pada dimensi penerapan kendala yang melibatkan tiga pihak untuk pengumpulan data yang diminta pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan keterlambatan untuk proses pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja. Penelitian ini menyarankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang agar bisa memberikan tambahan wewenang pada kata sandi kepada pegawai yang lain sehingga dapat membantu staff penataan madya jaminan kecelakaan kerja, serta pada dimensi penerapan yang melibatkan tiga pihak meliputi pihak rumah sakit, perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun pihak perusahaan lambat dalam pemenuhan persyaratan klaim yang berimbas pada pencairan dana klaim oleh BPJS Ketenagakerjaan,

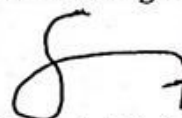
Kata Kunci: Implementasi, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pembimbing I



Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP.196911191998032002

Pembimbing II



Dr. Gatot Budirato, MS
NIP. 195806091984031002

Palembang, Januari 2021
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



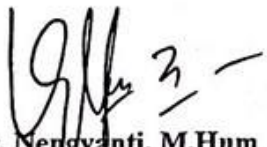
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

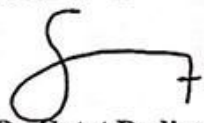
This study discusses the implementation of the part of Palembang Employment Accident Insurance and Social Security (BPJS) in accordance with Government Regulation Number 44 of 2015 concerning the Implementation of the Work Accident and Death Security Insurance Program. In this Work Accident Insurance Program there are still claims pending in 2018 to 2020. This research aims to find out claims from the work accident insurance program. The theory used in this research is Charles Jones implementation theory, where there are three dimensions of policy implementation, namely organization, interpretation, and implementation. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the research show that the claim process in this work accident insurance program has not been going well because the organizational dimension of the authority to input the claim data is only on one staff and on the dimension of applying constraints involving three parties for requested by Insurance and Social Security which caused delays to process work accident insurance claims payments. This study suggests the Insurance and Social Security in the part of Palembang to be able to provide additional authority on passwords to other employees so that they can assist intermediate management staff work accident insurance, as well as in the implementation dimension involving three parties including the hospital, company and Insurance and Social Security (BPJS). However, the company was slow in fulfilling the claim requirements which resulted in the disbursement of claim funds by Insurance and Social Security (BPJS)

Keyword : Implementasion, Work Accident Security Program Implementation Insurance and Social Security (BPJS)

Advisor I


Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196911191998032002

Advisor II


Dr. Gatot Budirato, MS
NIP. 195806091984031002

Palembang, Januari 2021
Department Chief of The Public Administration
Faculty of Social and Political Science
University Sriwijaya


Zailani Surya Marpaung, S.Sos. MPA
NIP.198108272009121002



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala kasih dan karuniaNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palembang” guna untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana S-1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum. selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penulisan skripsi ini
5. Bapak Drs. Gatot Budriato, MS. selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si. dan Bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si. selaku dosen Pembahas Seminas Usulan Proposal yang telah memberikan masukan dan saran pada proposal usulan skripsi saya selama ujian berlangsung.
7. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan selama setiap semester.
8. Seluruh Dosen, Staf, dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Zain Setiadi selaku kepala cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang yang telah banyak membantu saya dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ruzdian Deddy, Ibu Eva dan Ibu Kisty selaku Staff BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang yang telah banyak membantu saya dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman, wer grup, della, fidi, panji jomblowati seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Sege nap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari dan berguna bagi pihak yang berkepentingan.

Palembang, Januari 2021

Cendy Faadhilah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Administrasi Publik	7
2. Kebijakan Publik	8
3. Implementasi Kebijakan	8
4. Model- model Implementasi.....	9
5. Program Jaminan Kecelakaan kerja	11
B. Pendekatan yang digunakan.....	12
C. Penelitian Terdahulu	13
D. Kerangka Pemikiran.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Definisi Konsep	20
C. Fokus Penelitian.....	21
D. Jenis dan sumber data	22
E. Informan dan Key Informan Penelitian	22
F. Teknik Pengumpulan data.....	22
G. Validitas data	23
H. Teknik Analisis data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat BPJS Ketenagakerjaan	26
2. Lokasi Perusahaan	26
3. Visi dan Misi	28
4. Struktur Organisasi	29
5. Tugas dan Pokok	30
6. Arti Logo	36
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Organisasi	38
a. Sumber daya	39
b. Unit- unit	40
2. Interpretasi	44

a.	Tranmisi.....	41
b.	Kejelasan	43
c.	Konsisten	45
3.	Penerapan.....	50
a.	Pelayanan.....	51
b.	Pembayaran	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		55
1.	Kesimpulan	55
2.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....		58
LAMPIRAN		60

DAFTAR TABEL

Tabel

1.	Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	2
2.	Data Pengajuan Klaim tahun 2018-2020.....	4
3.	Data kasus klaim tertunda dan dibayarkan tahun 2018 – 2020	5
4.	Penelitian Terdahulu.....	13
5.	Fokus Penelitian	20
6.	Tabel jumlah pegawai BPJS Ketenagakerjaan Bidang Pelayanan.....	40
7.	Tabel prosedur pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.....	41
8.	Tabel jumlah karyawan tetap dan karyawan kontrak BPJS Ketenagakerjaan	43
9.	Tabel prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.	Kerangka Pemikiran	4
2.	Struktur organisasi BPJS TK CAB.Palembang.....	17
3.	Logo BPJS Ketenagakerjaan	45
4.	Foto sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	52
5.	Foto pelayanan dan fasilitas BPJS TK CAB.Palembang	128

DAFTAR SINGKATAN

BPJSTK	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPU	: Bukan Penerima Upah
PU	: Penerima Upah
JHT	: Jaminan Hari Tua
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	: Jaminan Kematian
STMB	: Sementara Tidak Mampu Bekerja
Klaim	: Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
2. Surat izin penelitian BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang
3. Surat izin balasan penelitian BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang
4. SK Pembimbing mahasiswa
5. Kartu Bimbingan mahasiswa
6. Lembar revisi seminar proposal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan menurut George J. Gordon (dalam Syaffie 2016:33). Edgar N. Gladen dalam (Nugroho 2003:9) mengatakan bahwa *“the oldest profession is not prostitution but administration”*. Masyarakat perlu diatur, sebelumnya oleh kepercayaan agama, dan tradisi kemudian berkembang menjadi administrasi publik. Selanjutnya Echols & Hassan Shadily (dalam Nugroho 2003:10) *Public administration* sebagai ilmu ketataprajaan, ilmu usaha negara, administrasi pemerintahan atau negara.

Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita-cita setiap bangsa dan negara, namun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa dan negara menempuh jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan filosofi buat apa negara itu didirikan. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, tidak terlepas dari lingkungan kita berada, kondisi suatu bangsa dan negara dengan seperangkat ketentuan perundangan yang melandasinya.

Salah satu bentuk untuk menjadi negara kesejahteraan adalah dengan menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan kepada setiap tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dengan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (persero), namun berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014. BPJS ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2015 menurut UU BPJS

Ketenagakerjaan berfungsi menyelenggarakan empat program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pension (JP), dan jaminan kematian (JK). Program jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan program pertama yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian menyelenggarakan tiga program yakni program jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Berikut adalah data kepeserta yang aktif pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang

Tabel 1.1 Data Kepesertaan Aktif pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Peserta Aktif
1.	2018	4.801
2.	2019	7.081
3.	2020	6.205

Sumber: dokumen BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang

Berdasarkan tabel di atas, bahwa data kepesertaan yang telah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2018 jumlah peserta aktif memiliki angka yang paling rendah diantara tahun 2019 dan 2020, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 813 peserta aktif pada tahun 2020. Program jaminan kecelakaan kerja disingkat (JKK) adalah suatu program pemerintah dan Pemberi Kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan saat menuju, menunaikan tugas pekerjaan dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang selanjutnya diperbaharui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019. Apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bahwa setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai

Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 37 pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK. Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan paling lama tujuh hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi ganti rugi sebesar 1% satu persen dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada Peserta.

Selain Peraturan Pemerintah terdapat juga Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian Dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah didalam pasal 20 ayat 6 bahwa apabila persyaratan pengajuan klaim tidak lengkap, BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan peserta bukan penerima upah atau wadah atau kelompok tertentu paling lambat 3 hari kerja sejak laporan tahap II diterima. BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar manfaat JKK kepada peserta paling lambat 7 hari setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.

Kecelakaan merupakan sebuah kejadian tak terduga yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat terjadi akibat kelalaian dari perusahaan, pekerja, maupun keduanya, dan akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi kedua pihak. Bagi pekerja, cedera akibat kecelakaan dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kualitas hidup pekerja tersebut. Bagi perusahaan, terjadi kerugian produksi akibat waktu yang terbuang pada saat melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut serta biaya untuk melakukan proses hukum atas kecelakaan kerja menurut Ridley (dalam Redjeki

2016:8). Santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat total tetap. Manfaat yang begitu banyak dari program jaminan kecelakaan kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan belum dapat dirasakan oleh seluruh para pekerja di Indonesia.

Berdasarkan prosedur tahap verifikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengajuan klaim adalah melakukan pelaporan jika karyawan perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan laporan dapat dilakukan dengan cara lisan secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau dengan cara tertulis melalui email resmi Tujuannya agar pihak BPJS Ketenagakerjaan mengetahui jika terjadinya kecelakaan. Laporan harus dilakukan maksimal 2 X 24 jam setelah kejadian kecelakaan tersebut. Setelah itu, pihak perusahaan menindak lanjuti laporan yang telah disampaikan sebelumnya dan mengisi formulir kecelakaan kerja tahap 1 yang dapat diakses dalam website resmi BPJS Ketenagakerjaan. Serta melampirkan beberapa dokumen yaitu surat keterangan sakit karyawan resmi dari dokter yang bertanggung jawab atau rumah sakit tempat karyawan tersebut dirawat, setelah laporan tahap diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, pihak BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan penghitungan total biaya yang dikeluarkan untuk menangani karyawan hingga sembuh atau dipulangkan ke rumah duka. Terkait karyawan yang meninggal dunia, BPJS juga akan menghitung santunan dan ganti rugi kecelakaan yang berhak didapatkan oleh keluarga atau ahli waris karyawan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat pemerintah.

Berikut adalah data pengajuan klaim pada program jaminan kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang Tahun 2018-2019.

Tabel 1.2 Data Pengajuan Laporan Klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja Tahun 2018-2020

No	Kelompok Kasus Program JKK	2018	2019	2020
1.	STMB	164	241	168
2.	Cacat Fungsi	22	20	20
3.	Cacat Sebagian	22	40	45
4.	Cacat Total Tetap	1	3	0
5.	Santunan Kematian	108	175	138
6.	Biaya Obat & Perawatan	1.035	1.908	2.050
7.	Protese/Orthese	27	24	20
8.	Rehabilitasi	49	154	194
9.	Beasiswa	33	26	6
10.	Santunan Berkala	1.010	1.890	2.094
Total		2.471	4.054	4.735

Sumber : dokumen BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang 2018-2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa data pengajuan klaim program jaminan kecelakaan kerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bahwa kasus terbanyak pada 2018 sampai dengan 2019 yaitu pada kategori biaya obat dan perawatan. Pada tahun 2018 sebanyak 1.035 dan pada tahun 2019 sebanyak 1.908, sedangkan pada tahun 2020 kategori kasus tertinggi adalah santunan berkala sebanyak 2.094. Klaim Program jaminan kecelakaan kerja yang diajukan pada sesuai bulan pengajuan maka pembayaran klaim juga dibayarkan dengan bulan yang sama oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, jika data tidak lengkap maka berkas klaim akan dikembalikan kepada perusahaan untuk dilengkapi dan dimasukkan dalam klaim pending atau tagihan tertunda.

Berikut adalah kasus klaim tertunda pada program jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang pada tahun 2018 sampai 2019.

Tabel 1.3 Data Klaim Tertunda dan Klaim Yang Dibayarkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja tahun 2018-2020

NO	TAHUN	JUMLAH KLAIM TERTUNDA	JUMLAH KLAIM YANG DIBAYARKAN
1.	2018	60	1.014
2.	2019	234	2.008
3.	2020	224	2.193

Sumber : dokumen BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang 2018-2020

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa klaim pada program jaminan kecelakaan kerja pada tahun 2018 mengalami pending atau tertunda sejumlah 60 klaim dan sejumlah 1.014 klaim yang sudah dibayarkan dari jumlah keseluruhan data pengajuan klaim pada tahun 2018 sejumlah 2.471. Pada tahun 2019 klaim tertunda sejumlah 234 dan sejumlah 2.008 klaim yang telah dibayarkan dari jumlah keseluruhan data klaim sebanyak 4.054, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 224 klaim tertunda dan 2.193 klaim yang telah dibayarkan dari jumlah keseluruhan data klaim sebanyak 4.735 Klaim Program jaminan kecelakaan kerja yang diajukan pada sesuai bulan pengajuan maka pembayaran klaim juga dibayarkan dengan bulan yang sama oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, klaim tertunda diatas merupakan pada proses tahap I yaitu pelengkapan data dari peserta yang mengajukan kecelakaan kerja, jika data tidak lengkap maka berkas klaim akan dikembalikan kepada perusahaan untuk dilengkapi dan dimasukkan dalam klaim pending atau tagihan tertunda, sedangkan pada proses klaim program jaminan kecelakaan kerja proses pengajuan bisa diajukan pada tahun sebelumnya tetapi pemenuhan persyaratan klaim dilakukan pihak peserta pada tahun selanjutnya maka pembayaran klaim bisa dilakukan pada tahun berikutnya.

Dari data pengajuan klaim tersebut masih terdapat klaim yang belum dibayarkan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta atau perusahaan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini klaim peserta terhadap BPJS Ketenagakerjaan merupakan tuntutan imbalan atas jasa layanan yang diberikan Pihak BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari

itu penulis menarik kesimpulan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja terhadap BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang ?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan dari permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan pada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini akan menjadi bahan kajian yang bermanfaat dan menjadi referensi pembelajaran bagi para mahasiswa-mahasiswa dan ilmuan administrasi Publik khususnya ruang lingkup implementasi kebijakan.
2. Secara Praktis, dengan adanya hasil dari penelitian ini ditujukan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang sehingga dapat menjadi kontribusi atau saran terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar dasar kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta
- Creswell, J. W. 2016. *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran*.
Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo : UNG Press Gorontalo
- Khoiril, Anwar 2007. *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*. Solo: Penerbit Tiga Serangkai
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* . Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Purwanto, Agus 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Redjeki, Sri. 2016. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujoso. 2012. *Dasar Dasar Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja*. Jember: Unej
- Winarno, Budi. 2014. *Teori dan Proses kebijakan publik*. Yogyakarta: PT. Pressindo

Peraturan- Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Internet

Habibullah, Nugroho, Kandung Sapto and Cadith, Juliannes (2016) *Implementasi Program*

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di Kota Tangerang

(Online), (<http://ane.fisip-untirta.ac.id/> diakses 17 Januari 2020)

Selly, Sapsena *Implementasi Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*

Ketenagakerjaan Di Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Karimun. (Online).

(<https://fisip.umrah.ac.id> diakses 17 Januari 2020)